

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Mattabulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 151 km ke arah Utara Kota Makassar. Desa ini memiliki luas wilayah ± 54 km², berada pada ketinggian sekitar 1.070 mdpl, dengan jumlah penduduk sekitar 1.733 jiwa yang tersebar di dua dusun, yaitu Dusun Cirowali dan Dusun Teppoe (Kabupaten Soppeng Dalam Angka, 2025). Secara geografis, Mattabulu terletak di kawasan pegunungan dan berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Watansoppeng. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani kebun, yang memanfaatkan kondisi alam pegunungan sebagai sumber penghidupan utama.

Topografi Desa Mattabulu yang berada di pegunungan menyimpan kekayaan potensi yang mengantarkan desa ini menjadi terbaik 10 tingkat nasional lomba Desa Wisata Nusantara 2024 dan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 (Kemenparekraf RI, 2024). Desa Mattabulu memiliki potensi alam yang beragam antara lain kopi, gula merah, dan madu hutan dengan cita rasa khas. Luas lahan kopi di Kecamatan Lalabata tercatat mencapai 125,00 Ha dengan produksi sebesar 23,95 Ton per tahun. Air nira diolah secara tradisional menjadi gula merah dan madu hutan dari Mattabulu dikenal memiliki kualitas alami yang tinggi (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, 2025).

Keragaman potensi alam di Desa Mattabulu juga menawarkan berbagai daya tarik wisata. Panorama objek wisata hutan pinus yang indah dan sejuk pada Hutan Pinus Lembah Cinta menawarkan sensasi menenangkan bagi pengunjung. Aliran deras Air Terjun Liu PangiE menjadi surga tersembunyi bagi wisatawan. Mattabulu unggul dari potensi wisata karena letaknya yang strategis dengan waktu tempuh 15 menit dari pusat Kota Watansoppeng Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2025). Mattabulu juga dikenal dengan wisata religinya, yaitu makam dari Lapassari Andi Pawellori Syekh Muhammad Ali, pemimpin Kerajaan Soppeng Riaja dan penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2025).

Namun, potensi tersebut mengalami hambatan serius akibat serangkaian bencana alam yang melanda Desa Mattabulu. Pada 3 November 2024 terjadi peristiwa pohon tumbang, yang kemudian disusul banjir bandang dan tanah longsor pada 22 Desember 2024. Bencana tersebut menutup akses utama menuju Kawasan Wisata Mattabulu dan menyebabkan aktivitas pariwisata terhenti (BPBD Soppeng, 2024). Dampak yang ditimbulkan sangat banyak, ditandai dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 83%, dari 5.660 kunjungan di Januari 2024 menjadi 955 kunjungan pada Desember 2024 (Rusani, 2024). Bahkan, sejak Januari 2025, aktivitas wisata di Desa Mattabulu

dilaporkan berhenti secara total.

Berhentinya aktivitas wisata di Desa Mattabulu berdampak pada menurunnya pendapatan asli desa yang bersumber dari aktivitas wisata. Kondisi ini juga memengaruhi keberlangsungan UMKM lokal yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata. Meskipun menyandang predikat sebagai desa wisata terbaik, pengelolaan UMKM di bawah naungan BUMDes Mattabulu dinilai belum optimal. Ketua BUMDes Mattabulu mengungkapkan bahwa dibutuhkan penguatan manajemen kelembagaan dan penguatan produk hasil UMKM Mattabulu, yaitu madu, gula merah, dan kopi agar mampu meningkatkan nilai jual dengan melakukan hilirisasi dan diversifikasi produk ekonomi lokal di Desa Mattabulu.

Menanggapi situasi tersebut, tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK-Ormawa) Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (KPI) Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat Mattabulu merancang program pemberdayaan bernama "Sipatokkong", yang dalam bahasa Bugis berarti "saling menopang untuk bangkit bersama". Program ini mengusung pendekatan *Collaborative Governance* yang diperkuat dengan nilai bugis Eppa Sulapa yaitu Macca (cerdas), Malempu (jujur), Warani (berani), dan Getteng (tangguh).

Masyarakat Bugis mengenal konsep *Sipatokkong* sebagai nilai kultural yang merepresentasikan semangat saling menopang dan bekerja secara kolektif. Nilai ini dipandang relevan sebagai dasar pendekatan *Collaborative Governance* dalam mempercepat pemulihan Desa Wisata Mattabulu pascabencana. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa dampak longsor tidak hanya merusak infrastruktur dan menghentikan aktivitas pariwisata, tetapi juga melemahkan pola kerja kolektif antaraktor yang sebelumnya bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu skema tata kelola kolaboratif.

Selain itu, dalam masyarakat Bugis dikenal nilai-nilai Eppa Sulapa' yang mencakup Macca (pintar), Malempu (jujur), Warani (berani), dan Getteng (tangguh). Nilai-nilai tersebut dipilih untuk menjawab persoalan lemahnya kapasitas adaptif masyarakat terhadap risiko bencana serta tantangan keberlanjutan pariwisata. Integrasi nilai Sipatokkong dan Eppa Sulapa' diharapkan mampu mengatasi kesenjangan antara kebutuhan pemulihan ekonomi, penguatan kelembagaan wisata, dan peningkatan kesadaran mitigasi kebencanaan yang sebelumnya berjalan secara parsial.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat desa diharapkan dapat membangun kembali ekosistem wisata secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Program Sipatokkong terdiri atas enam pilar kegiatan, yaitu:

1. Sipatokkong RibitaraE (bangkit dalam kebijaksanaan) merupakan solusi untuk penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dengan manajemen dan perencanaan kerja yang terukur.
2. Sipatokkong RidecengngE (bangkit dalam kebaikan) merupakan solusi peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata yang dilakukan guna memberdayakan pengelola Wisata Mattabulu.

3. Sipatokkong MarajaE (bangkit dalam kejayaan) merupakan solusi untuk mengaktifkan kembali Desa Wisata Matabulu melalui *branding* “Jelling (*Journey along the pearls of Indonesia*)”.
4. Sipatokkong RitongengngE (bangkit dalam kebenaran) merupakan solusi untuk mendesain sarana dan prasarana objek wisata yang informatif dan nyaman bagi wisatawan.
5. Sipatokkong RiminasaE (bangkit dalam harapan) merupakan solusi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang akan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam hasil desa.
6. Sipatokkong RimatajangE (bangkit dalam kemuliaan) merupakan solusi penguatan mitigasi bencana sebagai upaya preventif pariwisata berkelanjutan.

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi kelembagaan desa wisata, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui kolaborasi multi-sektor yang partisipatif. Upaya revitalisasi kawasan wisata Matabulu melalui program Sipatokkong diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan sosial pasca bencana.

Pemilihan topik ini relevan dengan Asta Cita Pemerintah Indonesia poin ketiga, yaitu meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif; dan program prioritas nasional poin ke-14, yaitu pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Relevansi tersebut tercermin dalam implementasi Program Sipatokkong yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi produk lokal, serta pengembangan usaha berbasis potensi desa seperti agrowisata kopi dan olahan hasil alam. Upaya tersebut tidak hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Selain itu, program ini turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-8 yakni *Decent Work and Economic Growth* melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan pekerjaan layak berbasis ekonomi hijau, serta poin ke-11 *Sustainable Cities and Communities* melalui penguatan ketahanan desa wisata pascabencana, penataan kawasan wisata yang lebih aman, serta penerapan mitigasi risiko bencana dalam tata kelola pariwisata. Integrasi antara penguatan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam Program Sipatokkong menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan desa wisata yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pengembangan desa wisata, pemberdayaan masyarakat, dan *collaborative governance* dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada desa wisata dalam kondisi normal dan

menempatkan aspek kolaborasi, ekonomi, serta mitigasi bencana secara terpisah. Penelitian yang secara khusus mengkaji revitalisasi desa wisata pascabencana melalui pendekatan *collaborative governance* yang diperkuat oleh nilai kearifan lokal masih sangat terbatas. Selain itu, kajian empiris yang mengintegrasikan *collaborative governance*, ekonomi hijau, dan mitigasi bencana dalam satu kerangka pengelolaan desa wisata berkelanjutan belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Sipatokkong sebagai model revitalisasi Desa Wisata Mattabulu pascabencana berbasis nilai Eppa Sulapa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan tata kelola pengelolaan kawasan wisata Desa Mattabulu pascabencana dalam mendukung ketahanan serta perlindungan masyarakat?
2. Bagaimana penerapan pendekatan *Collaborative Governance* berbasis nilai kearifan lokal Eppa Sulapa dalam Program Sipatokkong sebagai upaya penguatan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat pascabencana di Desa Mattabulu?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Program Sipatokkong terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan bencana, dan pengurangan risiko kesehatan dalam mendukung ekonomi hijau serta pariwisata berkelanjutan di Desa Mattabulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis implementasi Program Sipatokkong dalam revitalisasi kawasan wisata Desa Mattabulu pascabencana melalui pendekatan *Collaborative Governance* berbasis nilai kearifan lokal Eppa Sulapa sebagai upaya penguatan tata kelola, pemberdayaan masyarakat, pengurangan risiko kesehatan, serta dukungan terhadap ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis kondisi kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan tata kelola pengelolaan kawasan wisata Desa Mattabulu pascabencana dalam mendukung ketahanan dan perlindungan masyarakat.
2. Menganalisis penerapan pendekatan *Collaborative Governance* berbasis nilai Eppa Sulapa dalam Program Sipatokkong sebagai strategi penguatan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat pascabencana.
3. Mengevaluasi dampak pelaksanaan Program Sipatokkong terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan bencana, dan pengurangan risiko kesehatan dalam mendukung ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan di Desa Mattabulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Bagi Masyarakat Desa Mattabulu

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Mattabulu dalam meningkatkan kemampuan mengelola potensi wisata lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya ekonomi hijau, inovasi produk lokal, serta kesiapsiagaan terhadap bencana guna mendukung keberlanjutan wisata desa.

1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi dan kearifan lokal. Hasil penelitian ini diharapkan membantu pemerintah desa memperkuat kelembagaan Pokdarwis dan BUMDes, serta merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada ketahanan ekonomi dan lingkungan.

1.4.3 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan referensi bagi akademisi, organisasi mahasiswa, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi program revitalisasi desa wisata di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa Wisata

Desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata berbasis pedesaan yang memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat sebagai daya tarik utama wisata (Lane & Kastenholz, 2023). Dalam praktiknya, desa wisata berkembang sebagai alternatif terhadap pariwisata massal yang kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal serta berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi (UNWTO, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa desa wisata yang dikelola secara partisipatif mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa (Astuti et al., 2021). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dan tata kelola yang berkelanjutan.

Pengembangan desa wisata juga dipandang sebagai strategi diversifikasi ekonomi pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro berbasis potensi lokal (Putra et al., 2022). Wahyuni dan Suryani (2023) menekankan bahwa sektor kuliner, kerajinan, dan jasa wisata menjadi penggerak utama ekonomi lokal dalam desa wisata. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Sidiq dan Resnawaty (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengendalikan arah pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka (Suharto, 2021). Dalam konteks desa wisata, pemberdayaan masyarakat menempatkan warga desa sebagai pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengambil peran strategis dalam pembangunan destinasi wisata. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan ini berkontribusi pada terciptanya kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan (Putra et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata diwujudkan melalui partisipasi aktif warga dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata (Astuti et al., 2021). Partisipasi tersebut mendorong rasa memiliki terhadap desa wisata sehingga meningkatkan komitmen masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan, pelayanan, dan keberlanjutan destinasi. Tingkat partisipasi yang tinggi juga berperan dalam memperkuat ketahanan sosial dan kelembagaan desa wisata (Sidiq & Resnawaty, 2021)

Selain partisipasi, pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap modal dan peluang usaha pariwisata (Suharto, 2021). Pelatihan pengelolaan usaha wisata dan penguatan literasi digital menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa wisata. Pemberdayaan yang berjalan efektif memungkinkan masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai nilai pariwisata dan mendukung keberlanjutan pengelolaan desa wisata (UNWTO, 2020).

Dalam konteks desa wisata pascabencana, pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Suharto (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pascabencana perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas agar masyarakat mampu mengakses sumber daya dan mengendalikan arah pembangunan yang berdampak pada kehidupannya. Pascabencana, desa wisata umumnya menghadapi penurunan pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta melemahnya kapasitas kelembagaan lokal, yang dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan pariwisata (Astuti et al., 2021). Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata menjadi penting untuk mempercepat pemulihan dan membangun kembali fungsi desa wisata sebagai sumber penghidupan masyarakat (Putra et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat pascabencana dalam desa wisata diwujudkan melalui peningkatan keterampilan, pendampingan usaha pariwisata, serta penguatan peran kelembagaan lokal seperti kelompok sadar wisata dan kelompok usaha masyarakat. Sidiq dan Resnawaty (2021) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa wisata berkontribusi terhadap penguatan ketahanan sosial dan kelembagaan desa. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha berbasis potensi lokal berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Putra et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan pengurangan kerentanan dan risiko kesehatan, khususnya melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana dan penataan lingkungan yang lebih aman, sehingga mendukung keberlanjutan desa wisata pascabencana (Suharto, 2021).

2.3 Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik melalui mekanisme dialog, kepercayaan, dan pembagian peran yang setara antar aktor (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan model pengelolaan yang bersifat *top-down*, khususnya dalam konteks pembangunan yang melibatkan banyak kepentingan dan aktor, termasuk sektor pariwisata (Emerson et al., 2012).

Dalam pengembangan desa wisata, *collaborative governance* memungkinkan terbangunnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, masyarakat sebagai pengelola utama, serta sektor swasta sebagai pendukung pengembangan dan pemasaran destinasi, sehingga keterbatasan sumber daya dan kapasitas di tingkat lokal dapat diatasi secara bersama (Pratiwi & Kurniawan, 2024). Penelitian Astawa et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* mampu mendorong pengembangan desa wisata berkelanjutan melalui peningkatan inklusivitas dan keterlibatan masyarakat lokal. Hal serupa juga ditemukan oleh Purnamawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan memperkuat kapasitas kelembagaan desa wisata.

Penerapan *collaborative governance* juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola desa wisata melalui proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan kolaboratif ini dinilai mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan desa wisata dalam jangka panjang (Lane & Kastenholz, 2023).

Dalam konteks desa wisata pascabencana, *collaborative governance* memiliki peran strategis dalam mendukung proses pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu. Kondisi pascabencana umumnya ditandai dengan kerusakan infrastruktur, penurunan aktivitas pariwisata, meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat, serta potensi risiko kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat maupun wisatawan (Kapucu, 2013). Melalui pendekatan kolaboratif, koordinasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat diwujudkan dalam perumusan kebijakan pemulihan yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Rahmafritra et al., 2021).

Lebih lanjut, penerapan *collaborative governance* pada desa wisata pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan risiko kesehatan dan peningkatan ketahanan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan mitigasi bencana, penataan kawasan wisata yang aman, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal berperan dalam menurunkan potensi risiko kecelakaan, cedera, dan dampak kesehatan lainnya (Partelow, 2021). Dengan demikian, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan dalam perspektif Kesehatan Masyarakat karena mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang aman, sehat, dan berwawasan lingkungan pascabencana (Dai & Azhar, 2024).

Dalam konteks lokal dan pascabencana, pendekatan *collaborative governance* dapat diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antaraktor. Integrasi ini menjadi penting karena keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme struktural dan

institusional, tetapi juga oleh kesesuaian pendekatan tata kelola dengan sistem nilai yang hidup dan dipahami oleh masyarakat lokal. Dalam pengelolaan Desa Wisata Mattabulu, nilai kearifan lokal Eppa Sulapa berperan sebagai landasan normatif yang memperkuat proses pembangunan kepercayaan (*trust building*), solidaritas, dan tanggung jawab kolektif antaraktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Melalui internalisasi nilai Eppa Sulapa yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan diri sendiri, praktik *collaborative governance* tidak hanya berorientasi pada koordinasi program dan pembagian peran, tetapi juga pada penguatan ketahanan sosial budaya masyarakat pascabencana. Pendekatan ini memungkinkan proses kolaborasi berjalan lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya dalam situasi pascabencana yang ditandai oleh keterbatasan sumber daya dan melemahnya kohesi sosial. Dengan demikian, integrasi *collaborative governance* dan nilai Eppa Sulapa menjadi landasan konseptual dalam pengelolaan desa wisata pascabencana yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berakar pada nilai budaya lokal dan mendukung keberlanjutan pembangunan desa wisata.

2.4 Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dengan menjadikan efisiensi sumber daya serta pengurangan dampak lingkungan sebagai prinsip utama pembangunan (UNEP, 2021). Paradigma ini menjadi semakin relevan dalam sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (OECD, 2022).

Dalam konteks desa wisata, penerapan ekonomi hijau diwujudkan melalui pengelolaan destinasi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Praktik tersebut mencakup pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, serta penggunaan teknologi dan energi yang lebih ramah lingkungan dalam aktivitas pariwisata, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologis desa wisata (Wahyuni & Suryani, 2023).

Penerapan prinsip ekonomi hijau juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing desa wisata di tengah meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap isu keberlanjutan. Wisatawan cenderung memilih destinasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial, sehingga ekonomi hijau menjadi strategi penting dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing (Lane & Kastenholz, 2023).

Dalam konteks desa wisata pascabencana, penerapan ekonomi hijau menjadi pendekatan strategis dalam mendukung proses pemulihan ekonomi yang selaras dengan upaya perlindungan lingkungan. Pascabencana, desa wisata umumnya menghadapi kerusakan lingkungan, penurunan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat

kebutuhan pemulihan yang cepat. UNEP (2021) menegaskan bahwa ekonomi hijau berperan penting dalam memastikan proses pemulihan tidak menimbulkan degradasi lingkungan baru, melainkan mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Dalam sektor pariwisata, pendekatan ini relevan karena kualitas lingkungan merupakan faktor utama dalam menjaga keberlanjutan destinasi pascabencana (OECD, 2022).

Penerapan ekonomi hijau pada desa wisata pascabencana diwujudkan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih ramah, penguatan usaha ekonomi lokal berbasis sumber daya alam berkelanjutan, serta pengurangan limbah dan dampak ekologis dari aktivitas pariwisata. Wahyuni dan Suryani (2023) menyatakan bahwa praktik ekonomi hijau mampu mendukung pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan desa wisata. Selain itu, Lane dan Kastenholz (2023) menekankan bahwa destinasi wisata yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial memiliki daya tarik lebih tinggi bagi wisatawan, sehingga ekonomi hijau menjadi strategi penting dalam membangun kembali daya saing dan keberlanjutan desa wisata pascabencana.

2.5 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan memastikan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab bagi generasi sekarang dan mendatang (UNWTO, 2020). Konsep ini menjadi landasan penting dalam pengembangan desa wisata karena aktivitas pariwisata sangat bergantung pada kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal sebagai daya tarik utama (Lane & Kastenholz, 2023).

Dalam kerangka pariwisata berkelanjutan, aspek ekonomi diarahkan pada pemerataan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, sementara aspek sosial menitikberatkan pada pelestarian budaya serta penguatan identitas komunitas setempat. Di sisi lain, aspek lingkungan berfokus pada upaya konservasi alam dan pengendalian dampak negatif pariwisata agar aktivitas wisata tidak merusak daya dukung lingkungan (Bramwell et al., 2022).

Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan desa wisata membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya lokal. Pendekatan ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan desa wisata dalam menghadapi tekanan pasar dan perubahan lingkungan, sehingga pariwisata berkelanjutan menjadi prinsip fundamental dalam pengelolaan desa wisata jangka panjang (Lane & Kastenholz, 2023).

Dalam konteks desa wisata pascabencana, pariwisata berkelanjutan menjadi pendekatan penting untuk memastikan proses pemulihan tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pascabencana, desa wisata sering menghadapi kerusakan sumber daya alam, infrastruktur pariwisata, serta terganggunya kehidupan sosial masyarakat. UNWTO (2020) menekankan bahwa prinsip keberlanjutan dalam pariwisata pascabencana perlu diarahkan

pada pemanfaatan sumber daya secara hati-hati agar tidak memperparah degradasi lingkungan dan kerentanan sosial masyarakat. Dalam hal ini, keberlanjutan menjadi kerangka kerja untuk membangun kembali destinasi wisata yang lebih tangguh dan adaptif terhadap risiko di masa mendatang.

Penerapan pariwisata berkelanjutan pascabencana juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial desa wisata. Bramwell et al. (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan mampu meningkatkan daya tahan destinasi terhadap tekanan eksternal, termasuk bencana alam. Selain itu, Lane dan Kastenholz (2023) menegaskan bahwa penguatan peran masyarakat lokal, pelestarian budaya, serta pengendalian dampak lingkungan merupakan faktor kunci dalam membangun kembali kepercayaan wisatawan pascabencana. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan tidak hanya menjadi prinsip pengelolaan jangka panjang, tetapi juga strategi pemulihan desa wisata yang berorientasi pada ketahanan dan keberlanjutan pascabencana.

2.6 Mitigasi Bencana dalam Kawasan Wisata

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan dan tindakan yang terstruktur (BNPB, 2021). Dalam konteks kawasan wisata, khususnya desa wisata yang banyak berkembang di wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah rawan bencana, perencanaan mitigasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan destinasi wisata (Djalante et al., 2021).

Mitigasi bencana dalam pengembangan desa wisata mencakup perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana, penyediaan infrastruktur pendukung evakuasi, serta pengembangan sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh masyarakat dan wisatawan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata, karena ketiadaan mitigasi yang memadai dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi desa wisata (UNDRR, 2022).

Selain aspek teknis, peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan elemen kunci dalam mitigasi bencana berbasis komunitas di desa wisata. Edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, dan simulasi evakuasi berperan dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pendekatan berbasis komunitas ini memperkuat ketahanan desa wisata terhadap risiko bencana dan mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata (BNPB, 2021).

Partelow (2021) menjelaskan bahwa peran modal sosial dan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pemulihan ekonomi pariwisata pascabencana. Djalante et al. (2021) menegaskan bahwa ketahanan komunitas akan lebih kuat apabila mitigasi bencana didukung oleh *collaborative governance* dan pemberdayaan masyarakat lokal.

2.7 Nilai Kearifan Lokal Bugis dalam Konsep Eppa Sulapa

Konsep Eppa Sulapa dalam nilai kearifan lokal Bugis merujuk pada empat nilai etika utama yang menjadi landasan perilaku sosial masyarakat, yaitu macca (cerdas), malempu (jujur), warani (berani), dan getteng (tangguh) (Mattulada, 2015). Keempat nilai ini tidak dipahami sebagai konsep simbolik semata, melainkan sebagai pedoman moral yang mengatur sikap, keputusan, dan tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat (Pelras, 2006). Eppa Sulapa berfungsi sebagai sistem nilai yang menjaga kehormatan diri (siri') dan harmoni sosial dalam masyarakat Bugis (Pelras, 2006).

Nilai macca mencerminkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berpikir serta bertindak, khususnya dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan (Mattulada, 2015). Dalam konteks pengelolaan desa wisata, nilai macca menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengelola potensi wisata secara inovatif, adaptif, dan berbasis pengetahuan lokal (Lane & Kastenholz, 2023). Penerapan nilai macca mendorong pengelolaan desa wisata yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan (UNWTO, 2020).

Nilai malempu menekankan kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam hubungan sosial dan pengelolaan sumber daya bersama (Pelras, 2006). Dalam desa wisata, nilai malempu tercermin dalam transparansi pengelolaan keuangan, pembagian manfaat ekonomi yang adil, serta kepercayaan antara masyarakat dan pengelola wisata (Sidiq & Resnawaty, 2021). Kejujuran menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan kelembagaan desa wisata (Pratiwi & Kurniawan, 2024).

Nilai warani mencerminkan keberanian moral untuk mengambil keputusan, menghadapi tantangan, serta mempertahankan kepentingan bersama masyarakat (Mattulada, 2015). Dalam pengembangan desa wisata, nilai warani tercermin dalam keberanian masyarakat untuk berinovasi, menghadapi perubahan, dan menolak praktik pariwisata yang merusak lingkungan maupun nilai budaya lokal (Lane & Kastenholz, 2023). Keberanian kolektif ini berperan penting dalam menjaga kedaulatan masyarakat lokal atas pengelolaan desa wisata (UNEP, 2021).

Nilai getteng menggambarkan keteguhan prinsip, konsistensi, dan ketangguhan dalam mempertahankan nilai dan komitmen sosial (Pelras, 2006). Dalam konteks desa wisata, nilai getteng berfungsi sebagai landasan untuk menjaga konsistensi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan pasar (Bramwell et al., 2022). Keteguhan nilai getteng memperkuat daya tahan sosial dan kelembagaan desa wisata Bugis dalam jangka panjang (Lane & Kastenholz, 2023).

Integrasi antara metode *Collaborative Governance* dan nilai Eppa Sulapa ini menjadi ciri khas pengelolaan Desa Wisata Mattabulu, di mana kolaborasi multiaktor diarahkan untuk membangun kepercayaan dan ketahanan sosial budaya.